



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MOA)



ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Tentang

KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 8107/B/UN3.FISIP/HK.07/2024
Nomor : 341/PM.04/K.JI/08/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1151/UN3/2020 tanggal 21 Desember 2020, berkedudukan di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **A. Warits, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, meliputi bidang pengembangan akademik dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing instansi **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kersajama ini meliputi :

- (1) Pendidikan dan Penyelenggaraan Kuliah Tamu;
- (2) Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian
 - **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penelitian termasuk mengumpulkan data di tempat **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu sesuai kesepakatan;
- (3) Magang (*internship*) dan kegiatan mahasiswa lainnya
 - Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang memasuki semester 6 (enam) dalam waktu studinya dan mendapatkan persetujuan dari pihak pertama dapat melakukan magang (*internship*) di instansi **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) bulan;
- (4) Partisipasi dalam pengabdian kepada Masyarakat
 - **PIHAK PERTAMA** dapat ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga dan Mitra. Selama proses pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala monitoring serta evaluasi kegiatan yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung oleh **MASING-MASING PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- (2) Semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur yang kemudian oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini;
- (4) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (5) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Pasal 7 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Alamat : Kampus B Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya

Telp. : (031) 5034015

Faksimile : (031) 5034015

Email : info@fisip.unair.ac.id

CP :

Telp./WA :

PIHAK KEDUA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur

Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

Telp. : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

CP : Ria Mustikah Drina Sundayani, S.A.P

Telp./WA : 085642828489

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FISIP

Universitas Airlangga Surabaya



Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Jatim



A. Warits, S.Sos

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	